



Daftar Isi

	Hal.
Daftar Isi.....	I
Daftar Tabel.....	Ii
Kata Pengantar.....	Iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Sampai Dengan triwulan II	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	11
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah.....	11
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup.....	13
3.3 Program dan Kegiatan.....	13
BAB IV PENUTUP.....	37

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat serta karuniaNYA kami dapat menyelesaikan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, yang nantinya akan berguna dan membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga akan terselenggaranya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal. Perubahan Renja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.

Gunungtua, 28 Juli 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Drs. ANWAR BENNI. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 196702271987101001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu dokumen perencanaan SKPD, Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun melalui skala prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kontribusi dalam perbaikan pelayanan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan dokumen perencanaan untuk semester II tahun berjalan, secara substansial memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaannya, yang pelaksanaannya difokuskan pada bulan Oktober, Nopember dan Desember Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan SKPD sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2025 dalam rangka untuk menyesuaikan situasi dan kondisi pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara saat ini, agar pelayanan dapat maksimal/berjalan lancar.

Perubahan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif, digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2025 adalah:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- c. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil

Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
12. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No.9 Tahun 2022 tentang Uraian tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026.
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara
15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perda RKPD tahun 2025, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 ini adalah : Perubahan Rencana Kerja disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 bertujuan untuk :

Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan.

Menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4 .Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Lingkungan Hidup sampai Triwulan II

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara Sampai Dengan Triwulan II

Untuk mencapai target-target indikator kinerja pada Perangkat Daerah maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu OPD Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2025 ini. Adapun jumlah Program yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 5 (lima) Program sudah termasuk Program Rutin, sementara jumlah Kegiatan termasuk Kegiatan Rutin sebanyak 10 (sepuluh) Kegiatan, dan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan sudah termasuk Sub Kegiatan Rutin, dengan alokasi dana belanja untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 5.027.236.124,-.

Adapun yang jumlah realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 ini sebesar Rp.2.300.970.377,- Atau sebesar 45.77 % dari total pagu anggaran yakni Rp. 5.027.236.124,- dengan capaian rata-rata kinerja sebesar 45%.

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara sampai Semester I Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

TABEL. 2.1
Evaluasi Kinerja Triwulan II
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/k ota pada Tahun 2024- 2029		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggara n RPJMD Kabupat en Padang Lawas Utara 2024 s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD		Pe ra ng kat Da era h Pe na ng gu ng Ja wa b
											I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 =7+13		1500,00%		16
			URUSAN PILIHAN																						
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP																						
1	â€¢ Terwujudny a Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	2.11. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KO TA	Peningkata n Tata Laksana Pelayanan Publik			-	125.636. 000	3.703	1.072.9 40.100	274	211. 077. 311	2	227.35 7.093	-	-	-	-	4	438.4 34.40 4	4	564.0 70.40 4	51,8 6%	40, 86 %	DI NA S LI N G KU N G AN HI D UP

1,7		2.11.01.1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja			3	62.818.000	4	35.853.000	2	17.268.500	2	16.730.000	-	-	-	-	3	33.998.500	7	96.816.500	49,21%	94,80%	
1.7.1		2.11.01.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	15.704.500	1	9.843.000	-		1	9.560.000					1	9.560.000	2	25.264.500	100,00%	97,12%	
1.7.2		2.11.01.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	15.704.500	1	10.098.500	1	9.560.000	-						1	9.560.000	2	25.264.500	100,00%	94,67%	
1.7.3		2.11.01.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1	7.708.500	1	7.708.500							1	7.708.500	1	7.708.500	100,00%	100,00%	
1.7.4		2.11.01.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1	31.409.000	1	8.203.000			1	7.170.000					1	7.170.000	2	38.579.000	100,00%	87,41%	

1,2		2.11.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Dan Honor Administrasi Tugas ASN			2	46.544.500	1	32.908.500	1	16.108.500	-	-	-	-	-	1	16.108.500	2	23.413.000	100,00%	48,95%	
			Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji														-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.2.2		2.11.01.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1	30.840.000	48	25.200.000	8	8.400.000	-					8	8.400.000	9	39.240.000	16,67%	33,33%	
1.2.1		2.11.01.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	15.704.500	1	7.708.500	1	7.708.500	-					1	7.708.500	2	23.413.000	100,00%	100,00%	
1,1		2.11.01.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas, Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek, Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek			2	11.634.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11.634.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1.1.1			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2	11.634.000	-	-	-	-						-	-	2	11.634.000	#DIV/0!	#DIV/0!	

1,3		2.11.01.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			730	315.369.800	3.289	133.909.800	114	32.049.400	206	64.413.580	-	-	-	-	## #	96.462.980	1 0 5 0	411.832.780	63,67%	61,45%	
1.3.1		2.11.01.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			68	80.495.800	15	31.954.000	14	27.269.400	-						14	27.269.400	8 2	107.765.200	93,33%	85,34%	
1.3.2		2.11.01.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			500	23.900.000	100	4.780.000	100	4.780.000							## #	4.780.000	6 0 0	28.680.000	100,00%	100,00%	
1.3.3			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			15	13.216.600	2.500	1.021.800									-	-	1 5	13.216.600	0,00%	0,00%	
1.3.4		2.11.01.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			32	40.000.000	624	40.000.000		-	156	10.000.000					## #	10.000.000	1 8 8	50.000.000	25,00%	25,00%	
1.3.5			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			115	157.757.400	50	56.154.000			50	54.413.580					50	54.413.580	1 6 5	212.170.980	100,00%	96,90%	
1,4		2.11.01.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Diadakan			22	410.846.439	22	478.315.000	4	77.453.100	4	78.765.700	-	-	-	-	8	156.218.800	3 0	567.065.239	36,36%	32,66%	

1.4.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			22	410.846.439	22	478.315.000	4	77.453.100	4	78.765.700					8	156.218.800	30	567.065.239	36,36%	32,66%	
1,6		2.11.01.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			774	278.370.179	387	391.953.800	153	68.197.811	78	67.447.813	-	-	-	-	##	135.645.624	1005	414.015.803	66,67%	54,10%	
1.6.1		2.11.01.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			150	1.500.000	75	750.000	75	750.000						75	750.000	225	2.250.000	100,00%	100,00%		
1.6.2		2.11.01.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	33.986.129	36	47.000.000	9	6.285.936	9	6.285.938					18	12.571.874	30	46.558.003	50,00%	26,75%	
1.6.3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			612	242.884.050	276	344.203.800	69	61.161.875	69	61.161.875					##	122.323.750	750	365.207.800	50,00%	35,54%	
Rata- Rata Capaian Kinerja																				51,86%					
Predikat Kinerja																				0					
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan lingkungan hidup			-	266.669.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	266.669.600	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

2,1		2.11.02.1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)K abupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Yang Disusun			1	266.669.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	266.669.600	#DIV/0!	#DIV/0!			
2.1.1			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun			1	266.669.600								-	-	1	266.669.600	#DIV/0!	#DIV/0!				
Rata- Rata Capaian Kinerja																		100,00 %							
Predikat Kinerja																									
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-			-	2.917.391.225	1.320	1.960.439.000	330	347.000.000	330	347.000.000	-	-	-	-	##	694.000.000	661	3.611.391.225	50,00%	35,40%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3,3		2.11.03.1	Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Sampling			1	2.917.391.225	1.320	1.960.439.000	330	347.000.000	330	347.000.000	-	-	-	-	##	694.000.000	661	3.611.391.225	50,00%	35,40%	
3.3.1			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanak an Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1	2.917.391.225	1.320	1.960.439.000	330	347.000.000	330	347.000.000					##	694.000.000	661	3.611.391.225	50,00%	35,40%	
Rata- Rata Capaian Kinerja																		50,00%							
Predikat Kinerja																									
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-			-	25.000.000	4	34.450.000	1	6.000.000	1	15.450.000	-	-	-	-	2	21.450.000	6	46.450.000	50,00%	62,26%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

4,1		2.11.05.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	terlaksananya uji laboratorium limbah			4	25.000.000	4	34.450.000	1	6.000.000	1	15.450.000	-	-	-	-	2	21.450.000	6	46.450.000	50,00%	62,26%	
4.1.1		2.11.05.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun			4	25.000.000	4	34.450.000	1	6.000.000	1	15.450.000					2	21.450.000	6	46.450.000	50,00%	62,26%	
Rata- Rata Capaian Kinerja																			50,00%						
Predikat Kinerja																									
6	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-			-	45.200.100	86	89.392.700	1	45.900.000	85	43.263.200	-	-	-	-	86	89.163.200	87	134.363.300	100,00%	99,74%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6,1		2.11.11.1	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Diadakan			1	45.200.100	86	89.392.700	1	45.900.000	85	43.263.200	-	-	-	-	86	89.163.200	87	134.363.300	100,00%	99,74%	
6.1.1		2.11.11.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			1	45.200.100	86	89.392.700	1	45.900.000	85	43.263.200					86	89.163.200	87	134.363.300	100,00%	99,74%	
Rata- Rata Capaian Kinerja																			100,00%						
Predikat Kinerja																									

1	æ¢ Terwujudny a Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN	2.11. 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	-			-	19.902.0 00	1	126.19 9.100	-	82.1 60.0 00	1	34.359. 300	-	-	-	-	1	116.5 19.30 0	2	136.4 21.30 0	100, 00%	92, 33 %	DINAS LINGK UNGAN HIDUP
1,1		2.11. 04.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	-			1	19.902.0 00	1	126.19 9.100	-	82.1 60.0 00	1	34.359. 300	-	-	-	-	1	116.5 19.30 0	2	136.4 21.30 0	100, 00%	92, 33 %	
1.1. 1		2.11. 04.1. 1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenanga n Kabupaten/ Kota			1	19.902.0 00	1	126.19 9.100		82.1 60.0 00	1	34.359. 300					1	116.5 19.30 0	2	136.4 21.30 0	100, 00%	92, 33 %	
										3.283.4 20.900		692. 137. 311		667.42 9.593	-	-	-	-		1.359 .566. 904	7 6 0	4.492 .696. 229			
Rata- Rata Capaian Kinerja																				100,00%					
Predikat Kinerja																									

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Indikator capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara belum memiliki Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan digunakan indikator Kinerja yang ada dalam Renjana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 – 2026 yang dikembangkan menjadi Kinerja Kunci, sebagaimana telah disusun oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (IKU)
Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target Renstra SKPD tahun ke			Realisasi Capaian tahun ke			Rasio Capaian pada tahun ke		
		tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026	tahun 2024	than 2025	tahun 2026	thn 2024	thn 2025	thn 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai AKIP OPD	62 %	63 %	64 %	61,15 %			0,9		
2	Indesk Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	78 %	80 %	82 %	78 %			1		
3	Persentase titik pantau Peningkatan Tutupan Lahan	71 %	72 %	73 %	71 %			1		
4	Persentase titik pantau peningkatan Mutu Kualitas Udara	73 %	74 %	75 %	73 %			1		

TABEL 2-3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (IKK)
Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke			Realisasi Capaian tahun ke			Rasio Capaian pada tahun ke		
					tahun 2024	tahun 2025	tahun 2026	tahun 2024	than 2025	tahun 2026	thn 2024	thn 2025	thn 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota				71 %	72 %	73 %	72 %					
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota				44 %	46 %	48 %	18 %					
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota				80 %	90 %	100 %	80 %					

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas, dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Arah Kebijakan Nasional dalam perubahan APBN 2025 berfokus pada penguatan kualitas belanja negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan kesinambungan pembangunan nasional. Kebijakan ini juga diarahkan untuk penguatan belanja modal, reformasi subsidi dan perlindungan sosial, serta peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pusat dan daerah.

Pokok-pokok arah kebijakan nasional dalam perubahan APBN 2025 :

1. Penguatan Kualitas Belanja :

APBN 2025 menekankan pentingnya efisiensi belanja non-prioritas, penguatan belanja modal untuk transformasi ekonomi, reformasi subsidi dan perlindungan sosial, serta peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pusat dan daerah.

2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan :

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan.

3. Fleksibilitas APBN :

APBN 2025 dirancang agar memiliki fleksibilitas, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan memberikan ruang bagi pemerintahan selanjutnya dalam melaksanakan program pembangunan.

4. Pembiayaan APBN :

Defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar 2,53% dari PDB, yang akan ditutupi melalui pembiayaan utang yang dikelola secara prudent dan sustainable, serta pembiayaan investasi yang selektif.

5. Prioritas Belanja :

Sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam APBN 2025, dengan program-program seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

6. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :

Melalui berbagai program prioritas, APBN 2025 diharapkan dapat meningkatkan IPM, khususnya melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) dan perbaikan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

7. Pengelolaan Pendapatan Negara :

Pendapatan negara direncanakan bersumber dari penerimaan perpajakan dan PNBPN. Reformasi perpajakan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci dalam mencapai target pendapatan tersebut.

8. Koordinasi dan Sinergi :

APBN 2025 menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dengan demikian, perubahan APBN 2025 mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengakselerasi pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara nomor 28 tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 dijelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten

Padang Lawas Utara Tahun 2025 harus mengacu dan mengakomodir Visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu :

“Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Padang Lawas Utara yang Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat”.

Hal ini sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan Daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta Program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025. Perubahan arah Kebijakan Pembangunan Daerah dilakukan untuk memastikan beberapa tema atau isu Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional:

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
2. Program makan bergizi gratis (MBG);
3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem;
4. Pengendalian Inflasi di daerah;
5. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah;
6. Dukungan Swasembada Pangan, dan
7. Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan
8. Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara

a. Tujuan

Berdasarkan telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun

2024-2026 dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan pencapaian tujuan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bidang Urusan Lingkungan Hidup
- 2) Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Bidang Urusan Lingkungan Hidup

b. Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta pelayanan yang prima Bidang Lingkungan Hidup
- 2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara yang direncanakan Perubahan Renja pada tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada beberapa factor, yaitu :

- RPD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024 – 2026
- Efektifitas dan Efesiensi anggaran
- Indikator Kinerja Utama Dinas bLingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan sebagai panduan untuk pelaksanaan program dan

kegiatan rekapitulasi program dan kegiatan pada perubahan renja tahun 2025 Sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengalami perubahan sebanyak 11 (Sebelas) Sub kegiatan yang meliputi pergeseran anggaran antar rekening, pengurangan output, penambahan output, dan perubahan yang berimplikasi pada penambahan maupun pengurangan anggarannya. Rencana kegiatan dituangkan dalam matriks sebagaimana tertampil pada tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2025
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2025

NO	KODE	JURUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN AAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEUSUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP								5.135.025.961,00	5.895.125.111,00	5.252.901.519,00	117.875.558,00						6.935.411.089,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.135.025.961,00	5.895.125.111,00	5.252.901.519,00	117.875.558,00				Q			6.935.411.089,00			

[illegible]

[illegible]

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.098.500,00	10.098.500,00	7.708.500,00	- 2.390.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DAN ALO KASI UMU M (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelak sana an Reformasi Birokrasi			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	14.906.000,00	18.306.000,00	8.203.000,00	- 6.703.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DAN ALO KASI UMU M (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelak sana an Reformasi Birokrasi			31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaporkannya administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	1.844.994.661,00	1.877.308.311,00	1.811.661.269,00	33.333.392,00	-		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Lingkungan Hidup		2.162.314.318,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.694.976.161,00	1.714.579.811,00	1.778.752.769,00	83.776.608,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.963.534.318,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	4 Do ku me n	139.92 0.000,0 0	150.24 0.000,0 0	25.200.00 0,00	- 114.72 0.000,0 0	Kab. Pada ng Lawa s Utara , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memperk uat penyelara san kehidupa n yang harmonis dengan lingkunga n, alam, dan budaya serta peningkat an toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarak at yang adil dan makmur.	--			182.280.0 00,00	DINAS LINGK UNGA N HIDU P
2.11. 01.2. 02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 La por an	10.098. 500,00	12.488. 500,00	7.708.500 ,00	- 2.390.0 00,00	Sem ua Kota/ Kab, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa Kab. Pada ng Lawa s Utara , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memperk uat penyelara san kehidupa n yang harmonis dengan lingkunga n, alam, dan budaya serta peningkat an toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarak at yang adil dan makmur.	Pelak sana an Refor masi Birok rasi Pelak sana an Refor masi Birok rasi			16.500.00 0,00	DINAS LINGK UNGA N HIDU P

[illegible]

			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	0 Orang	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	- 8.320.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Kacamatan, Sumatera Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakanJumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPDJumlah paket bahan logistik kantor yang disediakanJumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakanJumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakanJumlah paket				12 paket200 Laporan 2500lembar 32Dokumen 500 Kotak63 paket	12 paket 20 Lembaran 25 Lembar 32 Dokumen 500 Kotak 63 paket	265.016.500,00	287.984.000,00	154.931.700,00	- 110.084.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Lingkungan Hidup		440.144.271,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				68 Paket	68 Paket	78.200.600,00	100.800.100,00	52.975.900,00	-25.224.700,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			140.649.371,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				500 Paket	100 Paket	19.120.000,00	19.359.000,00	4.780.000,00	-14.340.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			25.095.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	4.891.600,00	5.020.600,00	1.021.800,00	- 3.869.800,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Kacamatan, Sumatera Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			21.849.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				32Dokumen	52 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Kacamatan, Sumatera Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125 Laporan	60 Laporan	0,00	122.804.300,00	56.154.000,00	56.154.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				212.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	NO URUSAN							5.135.025.961,00	5.895.125.111,00	5.252.901.519,00	117.875.558,00								6.935.411.089,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.135.025.961,00	5.895.125.111,00	5.252.901.519,00	117.875.558,00								6.935.411.089,00	
	2.11.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.135.025.961,00	5.895.125.111,00	5.252.901.519,00	117.875.558,00								6.935.411.089,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5.135.025.961,00	5.895.125.111,00	5.252.901.519,00	117.875.558,00								6.935.411.089,00	

	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Lingkungan Hidup		45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pada ng Lawas Utara , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 La por an	47.000. 000,00	47.000. 000,00	47.000.00 0,00	0,00	Kab. Pada ng Lawas Utara , Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11. 01.2. 08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				273 Laporan	27 6 La por an	307.75 0.200,0 0	344.20 3.800,0 0	344.203.8 00,00	36.453. 600,00	Kab. Pada ng Lawas Utara , Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			361.134.0 00,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharaan dan terawatnya Barang Milik Daerah				-	22 Unit	412.215.000,0	513.775.000,0	589.595.950,00	177.380.950,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanan Reformasi Birokrasi	Dinas Lingkungan Hidup		447.418.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	22 Unit	0,00	513.775.000,0	589.595.950,00	589.595.950,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanan Reformasi Birokrasi			412.418.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	NON URUSAN							5.135.025.961,00	5.895.125.111,00	5.252.901.519,00	117.875.558,00							6.935.411.089,00	

	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.135.0 25.961,00	5.895.1 25.111,00	5.252.901 .519,00	117.87 5.558,00							6.935.411. 089,00	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.135.0 25.961,00	5.895.1 25.111,00	5.252.901 .519,00	117.87 5.558,00							6.935.411. 089,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5.135.0 25.961,00	5.895.1 25.111,00	5.252.901 .519,00	117.87 5.558,00							6.935.411. 089,00	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Kematana, Sumatera Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanan Reformasi Birokrasi			35.000.00 0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1,	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	125.450.000,00							125.450.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percapaian Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	Percapaian Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJM D Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0 Do ku me n	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pada ng Lawas Utara , Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percapaian Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			5.450.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11. 02.2. 02.0 005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																			
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0 Do ku me n	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pada ng Lawas Utara , Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percapaian Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

																asis Lingk unga n				
2,	2.11. 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Titik Pantau Penangan Pencemaran Lingkungan				100 %	90 %	1.706.0 39.000, 00	1.960.4 39.000, 00	1.960.439 .000,00	368.96 1.000,0 0							2.075.000. 000,00	
	2.11. 03.2. 01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	1.706.0 39.000, 00	1.960.4 39.000, 00	1.960.439 .000,00	254.40 0.000,0 0			-	Perc epata n Pem erata an Infras truktu r Berb asis Lingk unga n Perc epata n Pem erata an Infras truktu r Berb asis Lingk unga n	Kabupaten Padang Lawas Utara		2.035.000. 000,00	DINAS LINGK UNGA N HIDU P
	2.11. 03.2. 01.0 001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				-	1 Do ku me n	0,00	1.960.4 39.000, 00	1.960.439 .000,00	1.960.4 39.000, 00	Kab. Pada ng Lawa s Utara , Sem ua Keca	DAN A ALO KASI UMU M (DAU) DAU YAN	-	Perc epata n Pem erata an Infras truktu r Berb			2.000.000. 000,00	DINAS LINGK UNGA N HIDU P

[illegible]

			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	0 Kegiatan	1.706.039.000,00	0,00	0,00	-1.706.039.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan	DAN ALO KASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNYAN BIDA NG KES EHA TAN	-	Percipatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percipatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Papan Informasi				30 unit	30 unit	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percipatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Kabupaten Padang Lawas Utara		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percetakan Pemertan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3,	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH				-	1 Ha	323.957.900,00	142.340.000,00	184.624.100,00	-223.957.900,00							100.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	323.957.900,00	142.340.000,00	184.624.100,00	-139.333.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	Percetakan Pemertan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Kabupaten Padang Lawas Utara		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

															beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan				
	2.11.04.2.01.004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Ha	1 Ha	323.957.900,00	142.340.000,00	184.624.100,00	-139.333.800,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percapaian Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

																Pem erata an Infras truktu r Berb asis Lingk unga n					
	2.11. 06.2. 01.0 001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																			
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	0 Do ku me n	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pada ng Lawa s Utara , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	-	Perc epata n Pem erata an Infras truktu r Berb asis Lingk unga n Perc epata n Pem erata an Infras truktu r Berb asis Lingk unga n			60.000.00 0,00	DINAS LINGK UNGA N HIDU P	
6,	2.11. 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase desa / kelurahan peduli lingkungan hidup				1 1 persen Persenta s e	1 pe rse n	0,00	0,00	0,00	10.000. 000,00							10.000.00 0,00		

	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Kemah Hijau</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Percetakan Pemertaan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Kabupaten Padang Lawas Utara		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>				1 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percetakan Pemertaan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

			Jumlah Masyarakat, Kelompok atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktivitas dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	2 Kelompok	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	- 13.800.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Sumatera Utara/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percapaian Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Sumatera Utara/Desa	DAN ALO KASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Percapaian Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			504.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kot a yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pada ng Lawa s Utara , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/D esa	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	Memperk uat penyelara san kehidupa n yang harmonis dengan lingkunga n, alam, dan budaya serta peningkat an toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarak at yang adil dan makmur.	Perc epata n Pem erata an Infrac truktur Berb asis Lingk unga n			100.000.000,00	DINAS LINGK UNGA N HIDU P
	J U M L A H								5.135.025.961,00	5.895.125.111,00	5.252.901.519,00	177.088.576.008,00							6.935.411.089,00	

BAB IV PENUTUP

Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang layanan pengadaan.

Perubahan Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya perubahan Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Kaidah-Kaidah Dalam Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Di dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 memerlukan waktu yang sangat panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- b. Di dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 masih jauh dari sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri nomor 54 tahun 2010 pemahaman tentang tata cara penyusunan masih berbeda-beda
- c. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang

ada di atasnya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Renstra SKPD.

Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan SKPD untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks seperti pelatihan, bimtek, sosialisasi serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kinerja aparatur perencanaan
- b. Aparatur perencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara yang ada saat ini dari sisi kuantitas sangat kurang, hal tersebut akan berakibatnya bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga dianggap perlu untuk menambah pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai menjadi berimbang
- c. Menerapkan system Reward and Punishment terhadap seluruh staf aparatur dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja

Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah di tetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada Tanggal : 28 Juli 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



Drs. ANWAR BENNI. MM
NIP. 19670227 1987101003

